

FUNGSI DAN PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Manuel Marion Yappen¹, Karsiman², Arie Purnomo³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peranan pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam proses pembangunan, mendata kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dan kemudian ditampung dan diberikan suatu solusi alternative pemecahan.dan bagaimana proses kehidupan masyarakat,.Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, pertama menggunakan Teknik penelitian pustaka (riset pustaka dan studi dokumentasi) dan yang kedua penelitian lapangan (observasi, Kuisisioner, wawancara). Dari hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh data sebagai berikut: Fungsi dan peranan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sangat penting bagi masyarakat, guna tercapainya tujuan pemerintah disegala bidang maka kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, maka pemerintah perlu meningkatkan fungsinya semaksimal mungkin, dan memainkan peranannya dan melakukan terobosan-terobosan guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang mandiri. Masyarakat dan pemerintah bersama-sama dituntut untuk berperan dan bersama-sama memandang kedepan tentang proses pembangunan di Kabupaten Raja Ampat sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan suasana kebersamaan kearah yang lebih baik. Didalam rangka menyesuaikan kepentingan masyarakat, maka pengaswasan dan partisipasi tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formil, tetapi oleh organisasi-organisasi masyarakat, golongan-golongan kepentingan (termasuk golongan cendekiawan, mahasiswa, buruh, wanita) kelompok profesi, bahkan anggota masyarakat atau seorang warga Negara bisa dapat turut mengawasi, sehingga pelaksanaan pemerintahan lebih dapat dipertanggung jawabkan.

Kata Kunci : Fungsi, Peran, Raja Ampat, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat telah menjadi salah satu perhatian yang sangat serius sejak pemerintahan orde baru dalam rangka pemerataan pembangunan dalam rangka untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah nusantara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merencanakan pembangunan itu, sehingga mencapai hasil yang optimal dengan tidak mengabaikan kondisi daerah itu.

Menurut Gunawan Sumodiningrat, kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu, kebijakan tidak langsung, kebijakan langsung dan kebijakaan khusus untuk daerah terpencil dan terbelakang. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa kebijakan tidak langsung diarahkan pada kondisi yang menjamin kelangsungan, upaya-upaya peningkatan, pemerataan pembangunan dan dukungan atas penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi rakyat, serta penyempurnaan peraturan undang-undang yang menunjang kegiatan ekonomi. Sedangkan kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan pemenuhan dasar dalam hal pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan disamping upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan yang bersangkutan

Dalam hal ini kebijakaan tidak langsung untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakanekonomi rakyat, program-program pembangunan untuk daerah perkampungan yang

telah cukup berhasil dimasa lalu perlu lebih ditingkatkan, disempurnakan dan dikembangkan. Ini menyangkut peningkatan dan penyempurnaan pengalokasian dana, sistem perbantuan dan pengkoordinasiannya disamping efektivitas dalam pelaksanaan program-program yang bersangkutan. Penyelenggaraan pemerintah umum pelaksanaannya yaitu pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan merupakan tanggung jawab pemerintahan, yang harus dilakukan secara terus menerus pada jenjang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan aspek luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik serta untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan skripsi ini adalah : **Pertama** Penulis ingin meneliti bagaimana fungsi dan peranan pemerintah Kabupaten Raja Ampat di dalam melayani masyarakatnya dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat agar kehidupan pembangunan ekonominya dapat mensejahterakan mereka. **Kedua** Mendata kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dan kemudian ditampung dan diberikan suatu solusi alternative pemecahan. **Ketiga** Melihat bagaimana proses kehidupan masyarakat, dan bagaimana alternative pemecahan masalah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat bagi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian atau riset dengan mengumpulkan data-data dan keterangan. Penelitian dapat didefinisikan menurut para ahli diantaranya adalah yang dikemukakan oleh Sugiono (2002:01) yaitu : Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh). Sehingga diperoleh sesuatu seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Penelitian biasanya menyesuaikan jenis suatu penelitian yang digunakan dengan pola permasalahan yang dirumuskan. Begitu pula dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang disesuaikan dengan pembahasan masalah yang akan dianalisis. Jenis penelitian terdiri dari tiga model yaitu : Model penelitian survey Yaitu suatu rancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian cermat objek penelitian berdasarkan kondisi tertentu. Dan informasi yang diperoleh dari responden dilakukan dengan mewawancarai masalah yang berhubungan dengan kualitas kinerja.

Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan, yang digunakan untuk mendukung gagasan teoritik atau konseptual mengenai variabel-variabel penelitian, yang dalam hal ini didukung dengan teknik :
 - 1) Riset kepustakaan berubah penelitian buku-buku teks atau literature yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian ini.
 - 2) Studi dokumentasi secara singkat teknik ini dapat dikatakan sebagai pengamatan terhadap gejala-gejala dari objek yang diteliti. Untuk menentukan apakah dokumen itu layak atau tidak untuk dijadikan sumber data maka harus dilakukan kritik internal dan kritik eksternal, kritik internal dilakukan dengan cara mengevaluasi keaslian dari materi-materi dokumentasi yang dilakukan. Kritik eksternal dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah org atau lembaga yang membuat dokumen tersebut.
- b. Penelitian lapangan, yang dilakukan dngan turun langsung kelapangan (survey) dengan cara :
 - 1) Observasi; merupakan penelitian dengan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya, serta memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan

yang langsung diperoleh dari data. Berdasarkan pada pendapat diatas, maka teknik observasi menjadi salah satu pilihan peneliti dalam melengkapi data yang merkaitan dengan objek peneliti ini, sehingga dengan teknik observasi penulis melakukan studi kasus pada kinerja pemerintahan Kabupaten Raja Ampat.

- 2) Kuesioner; merupakan teknik pengumpulan data baik secara langsung maupun tidak langsung berupa faktor pertanyaan yang berhubungan dengan kinerja pegawai.
- 3) Wawancara; merupakan taknik pengumpulan data dengan cara menyajikan pertanyaan secara langsung kepada responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Raja Ampat

Pemerintah merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat baik itu pembangunan kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perumahan dan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi masyarakat. Memberdayakan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat artinya melepas situasi atau keadaan ketertekanan, ketidak mampuan, ketidak berdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan dan hal – hal yang berkaitan dengan kelemahan.

Masyarakat Kabupaten Raja Ampat pada umumnya menginginkan perubahan- perubahan dan perkembangan pembangunan untuk itu pemerintah Kabupaten Raja Ampat didalam hal ini harus banyak memberikan pelayanan-pelayanan yang secara prima bagi masyarakat sebab masyarakat sangat mempercayai pemerintah dan menaruh harapan kepada pemerintah agar pemerintah dapat merasakan apa yang dirasakan selama ini oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini sangat penting dan esensial dalam membangun hubungan komunikasi yang efektif baik di antara masyarakat antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta kepercayaan dibangun atas dasar suau keyakinan dan pengakuan terhadap kebenaran yang melandasi hubungan antarprilaku. Satu dengan yang lain, akan merespon dan menerima dan memiliki kepercayaan tersebut berkaitan dengan keyakinan dan pengakuan atas suatu kebenaran tang dialami oleh masyarakat.

Dalam hubungan pemerintah (antara pemerintah dengan yang diperintah) kepercayaan dapat dikatakan sebagai penghubung atau pereket hubungan komunikasi yang efektif antara pemeritah dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terbangun apabila pemerintah menunjukkan sikap dan prilaku yang dapat dipercaya, dengan demikian maka, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan, pengakuan, dan respon masyarakat terhadap pemerintah terhadap bukti yang ditunjukkan pemerintah melalui pemenuhan janji/komitmen uantuk

melayani dan melaksanakan tugas dan fungsi yang berkenaan dengan pelayanan public, memiliki kerelaan menerima dan menghadapi akibat, dampak, resiko dan bahkan sanksi, adanya dorongan etis untuk melakukan sesuatu hal walaupun diluar tugas dan fungsi. Oleh karena itu akan di tunjukkan data partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dalam Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, seperti terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat dalam proses pembangunan

No.	Kegiatan	Jumlah yang terlibat	Tempat	Tahun
1.	Rapat	500 Orang	Kantor Pemda	2007
2.	Kerja Kebersihan Jalan	200 Orang	Jalan Utama	2008
3.	Padat Karya Bangunan Balai Pertemuan	300 Orang	Alun-Alun Kota	2009
4.	Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat	400 Orang	Puskesmas	2010

Data : Papeda Kabupaten Raja Ampat 2011

Untuk itu pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu membangun dan menjaga kepercayaan dari masyarakat kepada mereka sebagai pemerintah, berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka pemerintah perlu memerankan fungsi dan tugasnya secara optimal, fungsi dan tugas ini benar-benar di jalankan secara baik mulai dari tingkat pemerintahan kampung, Distrik, dan aparat pemerintah yang bertugas melayani kabutuhan masyarakat, karena Tugas pemerintah Daerah yang utama:

- a. Pemeliharaan keamanan (*basic security*) dan keteraturan umum (*public order*) agar individu-individu dapat menemukan kebahagiaan.
- b. Pemerintah menciptakan kemandirian dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keamanan kehidupan social. Sebagaimana masyarakat kita menjadi lebih kompleks, pemerintah juga lebih menjadi kompleks, lebih berkuasa, dan lebih mendominasi. Kontroversi mengenai betapa besar, berkuasa, dan betapa mendominasinya pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia.
- c. Melindungi hak-hak eksistensi (*asasi*) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran:
 - 1) Meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (*membentuk*) sumber daya baru sebagai peran Sub Kultur Ekonomi (SKE);

- 2) Mengontrol SKE, memberdayakan, dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Sub Kultur Kekuasaan;
- 3) Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP). Jika tujuan tersebut tercapai, pemerintahan (*governance*) berkualifikasi baik (*good*).

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini baru di mekarkan atau Daerah Otonom Baru yang baru berumur 2 tahun maka yang paling utama diperhatikan adalah fasilitas umum seperti jalan, sebab jalan ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Raja Ampat didalam meningkatkan taraf hidupnya baik itu pembangunan perumahan maupun pembanguan-pembangunan lainnya dan penghasilan-penghasilan seperti hasil perkebunan yang dihasilkan oleh masyarakat biasanya tidak bisa di perdagangkan akibat jalan yang menghubungkan distrik ke ibu kota kabupaten belum baik, maka perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kemudian fasilitas umum lainnya yaitu pembangunan pasar, Rumah Sakit umum, fasilitas-fasilitas umum ini perlu di perhatikan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat agar kepercayaan yang diharapkan dari masyarakat kepada pemerintah bisa berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat ,(Menurut Suseno 1991:58-61) Kepercayaan public akan merosot, apabila legitimasi kekuasaan menjadi dasar wewenang penguasa merosot. Ada tiga kemungkinan criteria atau factor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan Masyarakat:

- a. Legitimasi sosiologis, kriteria ini menjelaskan bahwa kepercayaan public dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat terhadap pejabat penguasa berdasarkan legitimasi tradisional, karismatik dan rasional-legal.
- b. Legalitas, Kriteria ini menjelaskan bahwa kepercayaan public dipengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat bahwa keberadaan suatu pemerintah atau perilaku pejabat pemerintah berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku.
- c. Legitimasi etis, criteria ini menjelaskan bahwa kepercayaan public di pengaruhi oleh adanya keyakinan masyarakat pemerintah atau penguasa telah bertindak menurut norma-norma moral.

Uraian diatas menunjukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Raja Ampat cenderung akan meningkat apabila pemerintah Kabupaten Raja Ampat dikelola oleh pejabat atau penguasa yang secara sosiologis memiliki legitimasi tradisional, karismatik dan rasional-legal, secara legalitas didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku dan secara etis, didasarkan kepada nilai atau norma moral berlaku dalam masyarakat. Kepercayaan public atau masyarakat kepada lembaga

pemerintah dan perangkatnya serta kinerja pemerintah bergantung pada seberapa besar tercapainya harapan masyarakat akan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Semakin rendahnya kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena itu, kepercayaan masyarakat erat kaitannya dengan fungsi pengharapan akan besar dan tingginya kinerja pemerintah terhadap keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat dipenuhi melalui kinerja pemerintah, maka kepercayaan akan tinggi. Akan tetapi, pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat rendah, maka di situlah letak merosotnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk itu perlu adanya paradigma baru yang disebut sebagai pembangunan partisipatoris yang mengindikasikan buat perspektif :

1. Melibatkan masyarakat setempat dalam pemeliharaan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap, dan pola berpikir, serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh.
2. Membuat umpan balik (*feed back*) yang pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Maka pemerintah Kabupaten Raja Ampat harus melibatkan dan memperhatikan masyarakat secara baik karena partisipasi merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a. Sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan pembangunan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan diusahakan agar yang satu berkaitan dengan yang lain, sehingga ketiganya dapat dianggap sebagai satu paket usaha.
- b. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha mengerakan partisipasi masyarakat.
- c. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.
- d. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang erat sekali, ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan tapi dapat dibedakan. Masyarakat yang berkemampuan demikian bisa membangun kampungnya dengan atau tanpa partisipasi vertikal dengan pihak lain.
- e. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dapat ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampungnya.

Hal seperti ini kalau dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat secara baik maka tujuan pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya akan terlaksana secara baik sesuai dengan tujuan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Peranan dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam Proses Pembangunan

Peranan pemerintah sangat penting dalam menciptakan keamanan dasar (*basic security*) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keamanan kehidupan social. Sebagaimana masyarakat kita menjadi kompleks, pemerintah juga menjadi lebih kompleks, lebih berkuasa, dan betapa dominasinya. Kontroversi mengenai betapa besar, berkuasa, dan betapa dominasinya pemerintah akan terus berlanjut dalam sisa sejarah hidup manusia.

Ndraha berpendapat bahwa pemerintah bertujuan melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, malestarkan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya, melalui proses interaksi, meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumberdaya baru sebagai sup kultur ekonomi, mengontrol subkultur ekonomi, memberdayakan, dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk.

Berkaitan dengan fungsi dan peranan pemerintah serta tujuan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat perlu:

- a. Berperan didalam proses pembangunan mulai dari daerah-daerah perkampungan yang daerahnya tidak dapat dijangkau baik melalui laut, udara, dan darat, pada Kabupaten Raja Ampat ada beberapa kampung yang tidak dapat dijangkau, untuk itu seluruh komponen atau perangkat pemerintahan Kabupaten Raja Ampat harus berperan aktif didalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang hidupnya masih terbelakang. Jadi peranan pemerintah ini harus di tingkatkan dalam menciptakan dan mengontrol kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Raja Ampat.
- b. Fungsi merupakan sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi banyak orang, atau dengan pengertian lain, didalam tubuh manusia semua organ-organ tubuh sangat berkaitan satu sama lain sehingga manusia itu dapat bergerak dengan baik sama halnya dengan fungsi pemerintah Kabupaten Raja Ampat, jadi fungsi ini mulai dari atasan yaitu kepala daerah (Bupati) sampai kepada seluruh staf-stafnya dan SKPD-SKPD yang ada dan sampai pada yang paling terendah yaitu kepala kampung harus bekerja sama dengan baik dan tidak terpisahkan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Fungsi pemerintah harus dijaga dan

berperan menanggulangi kebutuhan-kebutuhan social ekonomi masyarakat khususnya Kabupaten Raja Ampat.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah berupaya melakukan berbagai perubahan-perubahan bagi masyarakatnya agar masyarakat dapat hidup sejahterah dan dapat terlepas dari ketertinggalan pembangunan ekonomi.

Namun ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses-proses pembangunan antara lain :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan, apabila mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab didalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentivikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan bantuan tentang apa yang menjadi kebutuhn penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka.

Setiap bentuk partisipasi merupakan proses pembangunan mulai dari bentuknya sebagai gagasan sampai dengan bentuknya sebagai bangunan untuk itu partisipasi dapat dibagi 4 (empat) bagian :

- a. Sasaran pembangunan masyarakat, yaitu perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pembangkitan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.
- b. Peningkatan taraf hidup masyarakat diusahakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan swadaya masyarakat, dan juga sebagai usaha mengerakan partisipasi masyarakat.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembaangkan hasil pembangunan.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Di dalam proses pembangunan, masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan jalan mengembangkan tenaga atau harus kepada proyek-proyek pembangunan yang khusus, biasanya bersifat fisik.

3. Partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan.

Partisipasi ini dimana masyarakat Kabupaten Raja Ampat menerima manfaat materil seperti peningkatan income atau asset lain yang penting bagi kepentingan pribadi, manfaat social seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa-jasa lain manfaat ini seperti pengembangan kekuasaan politik dan kepercayaan umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan kekuasaannya.

Pemerintah pada dasarnya menginginkan bagaimana kesejahteraan masyarakat itu dapat tercapai namun didalam struktur pemerintahan tidak berjalan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang semestinya, maka program pemerintah yang direncanakan akan pincang atau tidak berjalan dengan baik, proses pemerintah seperti ini yang sementara ini di alami oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat seperti SKPD-SKPD yang sudah ada sebagian belum melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat mengalami hambatan, maka diharapkan agar pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam hal ini pimpinan atau (Bupati) agar segera bertindak mengambil keputusan yang baik agar pemerintahan Kabupaten Raja Ampat proses pemerintahannya dapat berjalan dengan baik mulai dari pimpinan-pimpinan SKPD sampai kepada bawahannya.

Pemecahan kendala-kendala yang dihadapi.

Kendala- kendala yang terjadi didalam kegiatan pemerintahan Kabupaten Raja Ampat sudah semestinya pemerintah harus melihat kembali apa saja yang menjadi kendala-kendala dan selanjutnya diperbaiki secara baik yaitu:

1. Pemerintah harus mengadakan pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistim kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran disamping bantuan pembangunan.
2. Pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Raja Ampat perlu membenahi setiap SKPD yang ada agar fungsi dan peranannya dapat berjalan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik maka tujuan yang pemerintah inginkan yaitu mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

3. Pelayanan public berkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintah dan pembangunan. Dalam kehidupan pemerintahan, ada bermacam-macam jenis pelayanan umum, antara lain dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dilihat dari kegiatan pemerintahan yang harus memberikan pelayanan bisa dibedakan berdasarkan kekhususan yang mengakibatkan perbedaan jenis perbedaan yang diberikan.
4. Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan, masyarakat diharapkan selalu antusias dan bekerja sama dengan pemerintah menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan yang ada serta merawat dan memelihara secara rutin dan sistimatis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak, toh ada bantuan pemerintah untuk pembangunan tang baru. Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan prasarana dan pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan sebagai berikut

1. Pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu proses pembangunan yang terjadi bergerak maju, bukan hanya dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah daerah akan tetapi diperlukan adanya partisipasi aktif dari warga masyarakat itu sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya ketergantungan masyarakat dengan sumber sosialnya untuk memberdayakan sumber-sumber yang ada baik dalam bidang ekonomi social budaya, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi dan peranan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sangat penting bagi masyarakat, guna tercapainya tujuan pemerintah disegala bidang maka kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, maka pemerintah perlu meningkatkan fungsinya semaksimal mungkin, dan memainkan peranannya dan melakukan terobosan-terobosan guna mensejahterakan masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang mandiri.
3. Fasilitas umum yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Raja Ampat, dalam rangka peningkatan pelayanan yang optimal dimana dari pelayanan tersebut dapat memberikan kontribusi besar bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan

keberhasilan pemerintah daerah serta tercapainya tujuan pembangunan seperti yang telah dicita-citakan.

4. Masyarakat dan pemerintah bersama-sama dituntut untuk berperen dan bersama-sama memandang kedepan tentang proses pembangunan di Kabupaten Raja Ampat sehingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan suasana kebersamaan kearah yang lebih baik.
5. Didalam rangka menyesuaikan kepentingan masyarakat, maka pengaswasan dan partisipasi tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formil, tetapi oleh organisasi-organisasi masyarakat, golongan-golongan kepentingan (termasuk golongan cendekiawan, mahasiswa, buruh, wanita) kelompok profesi, bahkan anggota masyarakat atau seorang warga Negara bisa dapat turut mengawasi, sehingga pelaksanaan pemerintahan lebih dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Blau, Peter M., Marshall W Meyer ; 1987. *Birokrasi Dalam masyarakat Modern*, Terjemahan Gery Rachman Jusuf, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi public di Indonesia*, Pusat studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dwiyanto , dkk, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kartasasmitha, Ginandjar, 1996, *Etika Birokrasi dan Pembangunan*, Makalah pada Dies Natalis UGM, Yogyakarta.
- Kartasasmitha, Ginandjar,, 1997, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemiskinan dan Praktiknya di Indonesia.*, LP3ES, Jakarta
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik Terjemahan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ma'rat, 1982, Sikap manusia, *Perubahan Serta Pengukurannya*, Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Mikkelsen, Britha 2001. dkk, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Mubiarto, 1984, *Strategi Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta P3PK, UGM.
- Ndraha, Taliziduhu, 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2004, *Fungsi Pemerintahan*, IPP, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2006. *Kebutuhan masyarakat Madani*, LPMPI. Jakarta
- Oleh Tim Kerja, 2003, *Pembentukan Kabupaten Maybrat*, Sorong.